

TAJUK RENCANA

DIY Siapkan Destinasi Wisata Sehat

SEIRING menurun dan terkenalnya kasus Covid-19, pemerintah pusat menurunkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DIY menjadi level 2. Tentu ini kabar menggembirakan bagi DIY sehingga harus direspons dengan penuh kehati-hatian dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Hal ini perlu kita tekankan mengingat ancaman Covid-19 belum berakhir. Bahkan, di sejumlah negara yang mengklaim telah memasuki fase endemi pun jumlah kasus harian bisa melonjak. Belajar dari pengalaman negara lain itulah kita harus lebih hati-hati dan tidak menganggap Covid-19 sudah sirna. Tentu bukan berarti potensi ancaman ini kita respons secara berlebihan, sebaliknya juga jangan larut dalam euforia.

Lebaran menjadi momentum bagi kita untuk lebih bijak dan berhati-hati menyikapi kondisi Covid-19 khususnya di DIY. Penurunan PPKM dari level 3 ke level 2 seharusnya menjadi penyemangat untuk lebih disiplin menerapkan prokes. Prokes diharapkan menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Berdasar data dari Polda DIY, 3,9 juta pemudik akan masuk ke DIY pada Lebaran tahun ini (KR 20/4). Jajaran kepolisian pun sudah mengantisipasi kedatangan pemudik ini. Antisipasi tentu tidak hanya berkenaan dengan kelancaran arus lalu lintas saja, melainkan juga aspek keamanan, kenyamanan dan kesehatan. Untuk itu diperlukan kerja sama dengan stakeholder agar para pemudik ini merasa aman dan nyaman.

Banyaknya pemudik yang masuk DIY sebenarnya sudah diprediksi mengingat dua Lebaran sebelumnya masyarakat tidak

diperbolehkan mudik akibat pandemi Covid-19. Kini pemerintah memberi kelonggaran bagi pemudik tanpa mensyaratkan tes antigen asalkan mereka sudah divaksin lengkap dan booster.

Dalam kaitan itulah diperlukan petugas di lapangan untuk mengecek apakah pemudik sudah mendapat vaksin lengkap atau belum. Inilah nampaknya yang menjadi problem karena rasanya tidak mungkin memeriksa satu-persatu penumpang. Artinya, masih ada potensi mereka yang belum divaksin, atau baru divaksin satu kali, bisa ikut mudik tanpa melalui tes antigen.

Aplikasi PeduliLindungi diharapkan menjadi skrining awal bagi pemudik. Sayangnya, belum semua warga menggunakan aplikasi ini dengan berbagai alasan. Meski demikian, petugas sebenarnya bisa melakukan pemeriksaan secara manual untuk mengetahui apakah seseorang telah divaksin atau belum yang ditunjukkan dengan bukti kartu vaksin.

Persoalan belum selesai sampai di sini, karena para pemudik ini nantinya juga akan menyerbu destinasi wisata yang tersebar di DIY. Inilah pentingnya untuk memperhatikan untuk sekolahan bidan. Adanya kematian ibu melahirkan tentu tidak bisa dibiarkan. Meski kita ketahui, zaman itu kondisi masyarakat masih sangat miskin, akibat kehidupan di zaman penjajahan yang sulit.

Realita masa kini pun tidak kalah miris. Pasalnya, saat ini angka kematian ibu (AKI) melahirkan di Indonesia juga masih cukup tinggi. Data Susenas 2015 mengungkap bila AKI di Indonesia masih 305 per 100.000 kelahiran. Sementara target AKI RP/JMN 2024 di angka 183 per 100.000 kelahiran. Namun data Kementerian Kesehatan (22/12/2021) mengun-

KARTINI yang dikenal sebagai pejuang emansipasi perempuan, adalah sosok yang pemikirannya melampaui zamannya. Masa itu perempuan harus nyaris tidak dapat bersuara mengemukakan keinginannya, Kartini telah berani melakukan *bargaining* dengan suaminya, Djohadiningrat. Ia menikah dan bernegosiasi agar tetap diizinkan untuk memberikan pendidikan pada anak-anak perempuan di lingkungannya itu.

Saying, perjuangan perempuan kelahiran Jepara 21 April 1879 dan mendapat dukungan suami harus berhenti, ketika takdir berkata lain. Dalam pelukan suaminya yang Bupati Rembang, 17 September 1904, Kartini menghembuskan nafas terakhir, setelah 4 hari melahirkan putranya, RM Soesalit. Kematian yang menghadirkan pelbagai isu. Namun tulisan ini tidak akan membahas isu-isu yang ada. Mengingat keluarga lebih meyakini meninggalnya Kartini, sebagai akibat kelahiran yang berat yang dikenal dengan istilah pre-eklamsia.

Realita yang mesti menyadarkan bangsa bila kematian ibu akibat melahirkan, sudah menjadi problema sejak zaman kolonial. Dalam salah satu suratnya, Kartini bahkan pernah menceritakan persoalan tersebut ketika dengan bahagia bercerita mendapat tawaran untuk sekolah bidan. Adanya kematian ibu melahirkan tentu tidak bisa dibiarkan. Meski kita ketahui, zaman itu kondisi masyarakat masih sangat miskin, akibat kehidupan di zaman penjajahan yang sulit.

Target Global

Realita masa kini pun tidak kalah miris. Pasalnya, saat ini angka kematian ibu (AKI) melahirkan di Indonesia juga masih cukup tinggi. Data Susenas 2015 mengungkap bila AKI di Indonesia masih 305 per 100.000 kelahiran. Sementara target AKI RP/JMN 2024 di angka 183 per 100.000 kelahiran. Namun data Kementerian Kesehatan (22/12/2021) mengun-

Memperingati Kartini, Mengingat AKI

Fadmi Sustiwi

kap jumlah kematian ibu mencapai 4.627 jiwa pada 2020.

Pandemi Covid-19 bisa jadi, menjadi salah satu sebab. Mengingat laporan pemerintah menyebutkan secara nasional AKI terus mengalami penurunan sejak tahun 2004 hingga saat ini. Namun apabila melihat tren berdasarkan data historis sejak tahun 2000, itu pun, diproyeksikan



KR-JOKO SANTOSO

nilai AKI diperkirakan baru akan mencapai 109-110 pada tahun 2030. Nilai ini masih di atas target Sustainable Development Goals (SDGs) sebesar 70 pada 2030.

Angka yang menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Hasto Wardoyo masih jauh dari target global. Mengingat dunia sebagaimana target Sustainable Development Goals (SDGs) mendorong AKI melahirkan di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi dan balita, ditargetkan turun hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup. Sehingga tanpa ada kebijakan *extraordinary*, target SDGs sulit un-

tuk tercapai. Untuk diketahui, kesehatan ibu dan anak adalah faktor sangat penting dalam SDGs.

Nomer Tiga

Fakta Kartini dan relita masa kini menyadarkan bila AKI bukanlah hal baru dalam dunia medis. Namun komitmen masyarakat global terhadap persoalan ini belum lama. Miris, laporan World Bank 2017 mengungkap AKI di Indonesia adalah nomer tiga tertinggi di Indonesia, dengan urutan di bawah Myanmar dan Laos. Budaya yang membuat perempuan tidak mampu menentukan sendiri untuk tubuhnya menjadi faktor cukup menentukan. Di samping kualitas dan layanan kesehatan yang belum merata, system rujukan bahkan juga kebijakan pemerintah daerah terkait kesehatan.

Tahun 1987, WHO dan organisasi internasional telah melahirkan *safe motherhood initiative* yang mencakup serangkaian upaya untuk menurunkan AKI. Dengan konsep lengkap bertujuan menjamin kondisi kesehatan sang ibu, janin, dan anak agar tetap optimal pada saat kehamilan, persalinan, dan pasca-melahirkan. Dalam hal ini kebijakan daerah yang dilakukan untuk mengurangi AKI harus luar biasa, jelas dan didukung *stakeholders* daerah. Sebab AKI adalah persoalan bersama bangsa. Tidak semata persoalan perempuan. □

*) **Fadmi Sustiwi**, wartawan peduli kesehatan

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

'Nuthuk' = Membodohi Wisatawan

'NUTHUK' adalah bisa dikatakan merupakan penyakit sosial yang tentu harus dihilangkan. Jika tahun lalu heboh di medsos karena pedagang kuliner Malioboro melakukan 'nuthuk' dan diusut tuntas. Pekan lalu kembali viral karena 'nuthuk' dilakukan pengemudi becak. Fakta yang membuat repot Pemkot Yogyakarta, karena 'nuthuk' samadengan membodohi wisatawan.

Yogya adalah kota pendidikan, kota budaya dan kota pariwisata. Tentu wisatawan akan *tumplek bleg* pada saat libur panjang, apalagi setelah 2 tahun seakan terkungkung pandemi. Seyogyanya pelaku dan pendukung pariwisata di Yogya juga memahami bahwa wisatawan yang berkunjung pasti sudah mempelajari bagaimana Yogya. Bahkan

tidak sedikit yang sudah mencari tahu dimana destinasi yang menarik, dimana menginap, makan, belanja oleh-oleh dan lainnya. Jadi kalau ada yang 'nuthuk' mereka akan melaporkan. Saat ini bahkan akan cepat direspons masyarakat bila diunggah di medsos. Jika pelaku tidak sadar, percayalah sejatinya mereka sedang bunuh diri. Karena kelak wisatawan akan enggan menggunakan jasa mereka. Jika ke Yogya akan berfikir lebih baik bersantap di resto, keliling dengan transportasi online bahkan belanja di toko. Karena semua itu harganya pasti. Dan ini akan disebarkan dari mulut ke mulut. Jadi, jangan bodohi wisatawan ke Yogya. □

Tiwi, warga Minomartani Sleman

Kuatkan Keamanan Kampung

RAMADAN sudah lebih 15 hari dilaksanakan. Pemudik pun mulai berdatangan. Warga DIY pun akan banyak yang mudik pula, bahkan termasuk asisten rumah-tangga (ART). Saat ini seperti ada euphoria mudik setelah dua tahun terpaksa tidak bisa mudik.

Bagi yang hendak mudik, jangan lupa lepaskan semua hubungan listrik, kecuall lampu de-

pan rumah dan teras. Jangan lupa titipkan rumah pada tetangga yang ada atau pengurus keamanan kampung. Sementara, keamanan kampung perlu dikuatkan karena harus menjaga banyak rumah, terlebih di kompleks perumahan. Semoga mudik lancar dan selamat dan yang ditinggal juga selamat. □

Novi, Timoho Yogya

MASALAH perbedaan jender dalam konteks inklusi keuangan telah mendapat perhatian dalam berbagai forum. Data Global Financial Inclusion Database (Global Findex) tahun 2011 menunjukkan bahwa secara global hanya 47% perempuan yang memiliki rekening di Bank dibandingkan dengan 54% laki-laki. Angka ini meningkat di tahun 2014 dimana 58% memiliki rekening, dan 65% laki-laki memiliki rekening. Kesenjangan yang lebih besar terjadi di negara berkembang termasuk di Indonesia.

Salah satu hasil riset IFC menunjukkan inklusi keuangan bagi perempuan mendorong kenaikan PDB antara 2% - 3,5%. Dalam penelitian tersebut disampaikan, ketersediaan kesempatan yang lebih baik bagi perempuan untuk mengelola keuangan akan berdampak positif pada makro ekonomi. Dengan pengembangan akses keuangan, pelatihan, dan dukungan jaringan wirausaha perempuan dapat mengatasi persoalan kesenjangan pemberian kredit atau pembiayaan sekaligus mendorong produktivitas bisnis.

Dalam skala mikro, peranan perempuan atas akses layanan keuangan juga memberikan manfaat tidak hanya bagi perempuan itu sendiri tetapi juga bagi keluarga, kelompok/asosiasi, bahkan lingkungan. Hal tersebut karena peranan ganda seorang perempuan yang secara budaya sebagai pengurus rumah tangga namun juga memiliki peran sebagai pekerja. Usaha-usaha skala home industri banyak memberikan kemudahan perempuan untuk bekerja dari rumah. Pemberian akses keuangan yang luas kepada perempuan menjadi faktor penting untuk mendorong kenaikan konsumsi, wirausaha, pengembangan UMKM, serta akumulasi aset.

Ditingkatkan

Kebijakan KUR untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi positif dalam perekonomian Indonesia yaitu dengan memberikan perluasan lapangan kerja bagi masyara-

Dian Ariani

kat. Pemberian KUR ini tidak hanya dapat dinikmati oleh perorangan namun juga oleh kelompok. Dengan bunga ringan, masyarakat dapat mengakses kredit ini untuk meningkatkan skala usahanya. Demikian juga untuk perempuan, selain secara perorangan, kelompok-kelompok perempuan di pedesaan dengan skala usaha super mikro-pun dapat mengakses kredit ini.

Berdasarkan data portofolio kredit produktif dari Bank BPD DIY, perbandingan jumlah debitur laki-laki dan perempuan sebesar 58,6% (40.065) berbanding 41,4% (28.760), menunjukkan bahwa akses kredit kepada perempuan perlu ditingkatkan. Kelompok perempuan seperti pembatik, pedagang tempat wisata memiliki anggota dengan kemampuan menjalankan usaha mikro sehingga memberikan dampak manfaat ekonomi lingkungan.

Kebutuhan pelatihan keuangan, pelatihan usaha dan pendampingan diperlukan oleh perempuan untuk meningkatkan usahanya. Kerjasama pelatihan oleh Dinas terkait, Bank kepada kelompok usaha mikro perempuan dapat menjadikan seorang perempuan lebih mandiri, berkembang dan memberi tambahan manfaat serta pendapatan bagi keluarganya. Seiring dengan kemajuan teknologi dengan adanya media sosial, jaringan wirausaha, serta asosiasi wanita pengusaha, perempuan dapat semakin mengembangkan usahanya secara cepat.

Akselerasi

Tentu saja literasi dan inklusi keuangan digital menjadi hal yang penting untuk disosialisasikan. Sehingga perempuan tidak terjebak dalam pinjol ilegal dan aplikasi

keuangan ilegal lainnya. Program akselerasi layanan keuangan digital dari Bank dapat diakses oleh perempuan sehingga mendorong sektor ekonomi di daerah lebih berkembang. Bank BPD DIY menyediakan aplikasi layanan keuangan digital melalui BPD Kawan Usaha untuk memudahkan UMKM mengakses layanan keuangan perbankan.

Keberadaan Pemerintah Daerah, Regulator (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan), Perbankan, ISEI serta Kadin sebagai organisasi pengusaha diperlukan untuk keberhasilan Program Literasi dan Inklusi khususnya bagi Perempuan agar lebih berdaya di Indonesia. Saat ini, Perempuan mengambil peran (lebih) nyata. Marilah kita sambut penyelenggaraan *Woman 20* di Yogyakarta. Selamat Hari Kartini. □

*) **Dian Ariani SE MM**, Direktur Kepatuhan Bank BPD DIY, Pengurus KADIN DIY & Anggota ISEI Cabang Yogyakarta

Pojok KR

Polda DIY ungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi.

-- Dimungkinkan masih ada skala lebih besar. ***

Pemerintah pusat turunkan PPKM DIY ke level 2.

-- Bukan berarti pandemi sudah berakhir. ***

3,9 juta pemudik masuk DIY, polisi siapkan pengamanan.

-- Tak hanya aspek keamanan, tapi juga kenyamanan.

Beraba

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afifiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani, Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Suniyarsih, Wakil: Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd, Wakil: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP